



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
2023**

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah untuk menggambarkan menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah serta Tujuan dan Sasaran Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. rencana kerja disusun dan dibuat dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan kesinambungan program tahun sebelumnya, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan pendanaan.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan waktu, dana serta kemampuan yang tersedia. Untuk itu saran dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari pembaca. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan kedepan.

Painan, Juli 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



TAMSIR, SH., M.M

Pembina Tingkat I IV.b

NIP. 19670312 198803 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT	
DAERAH TAHUN LALU	
8	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
2.4 Review Terhadap Awal RKPD	39
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	66
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	67
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	67
3.3 Program dan Kegiatan	70
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	94
BAB V PENUTUP.....	116

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM Kab Pesisir Selatan	31
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023 Kabupaten Pesisir Selatan.....	40
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023	66
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BKPSDM Pesisir Selatan	68
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2023	71
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Tahun 2023	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, serta dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan sumber daya manusia aparaturnya. Pengembangan sumber daya aparatur sebagai penyelenggara daerah ditentukan oleh saling keterkaitan antara faktor-faktor penentu, yaitu organisasi kelembagaan, mekanisme kerja, SDM aparatur dan tersedianya sarana dan prasarana pendukung lainnya.

Dalam upaya membangun aparatur pemerintah daerah sesuai dengan jiwa otonomi daerah dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance), maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan mengupayakan pengembangan kepegawaian yang dilaksanakan dengan penyempurnaan manajemen dibidang kepegawaian, peningkatan penyelenggaraan administrasi kepegawaian serta pengawasan dan pengendalian

kepegawaian dengan harapan tersedianya aparatur yang cakap, adaptif dan mampu menjabarkan serta menjalankan agenda pembangunan secara terencana, efektif, efisien, terstruktur dan komprehensif. Dalam menyatukan persepsi dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi harus dilandasi dengan tujuan serta rencana yang jelas dirumuskan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Diawali dengan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Negara yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Kepegawaian Negara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Badan Kepegawaian Negara menyelenggarakan fungsi : a. Pembinaan dan penyelenggaraan manajemen ASN; b. Penyelenggaraan manajemen ASN dalam bidang pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun; dan c. Penyimpanan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi Pemerintah serta bertanggungjawab atas pengelolaan dan pengembangan Sistem Informasi ASN.

Dalam menyelenggarakan fungsinya Badan Kepegawaian Negara mempunyai tugas sebagai berikut : a. Mengendalikan seleksi calon pegawai ASN; b. Membina dan menyelenggarakan penilaian kompetensi serta mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja pegawai ASN oleh Instansi Pemerintah; c. Membina jabatan fungsional di bidang kepegawaian; d. Mengelola dan mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN berbasis kompetensi didukung oleh sistem informasi kearsipan yang komprehensif; e. Menyusun norma, standar, dan prosedur teknis pelaksanaan kebijakan manajemen ASN.

Rencana Kerja BKPSDM mengacu pada Rencana Strategis BKPSDM yang diselaraskan dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan Kepegawaian Negara serta rencana kerja BKD Provinsi Sumatera Barat, yang kemudian dituangkan kedalam RKPD Kabupaten Pesisir Selatan dan RKA OPD sebagai usulan

pembiayaan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk penyusunan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Ranperda APBD.

1.2 Landasan Hukum

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 180 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023 adalah untuk memberi acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sehingga tercipta kesatuan gerak dan akuntabilitas kinerja organisasi yang sekaligus dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya dan pemerintah daerah umumnya.

Dengan adanya Rencana Kerja maka setiap kegiatan yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang ditetapkan, dapat dievaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalannya sehingga memudahkan dalam pengambilan kebijakan selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dilakukan dengan menghimpun data dari setiap bidang/struktur yang ada. Kemudian masing-masing bidang merumuskan bersama sub bidangnya berdasarkan hasil analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana tahun sebelumnya serta menginventarisir setiap kebutuhan organisasi, kebutuhan masyarakat yang dilayani dan kepentingan/kebijakan pemerintah daerah secara keseluruhan. Hasil berbagai rumusan bidang kemudian ditelaah dan dirumuskan dalam bentuk rencana kerja organisasi sebagai satu kesatuan yang utuh dan berhubungan satu sama lain.

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, maka disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan	
	1.1.	Latar Belakang Berisikan tentang dasar-dasar penyusunan dokumen Renja yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan dokumen perencanaan.
	1.2.	Landasan Hukum Berisikan tentang dasar-dasar hukum atau peraturan dan perundang-undangan yang dipakai sebagai landasasn dan acuan dalam penyusunan Renja
	1.3.	Maksud dan Tujuan Berisikan tentang tujuan dan sasaran pembangunan BKPSDM sebagai acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ASN BKPSDM
	1.4.	Sistematika Penulisan Berisikan tentang isi dan bagian-bagian dalam Renja BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sehingga memudahkan dalam mendalami penyusunan dokumen Renja ini
BAB II	Hasil	Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu
	2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022
	2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Berisikan tentang analisis kinerja pelayanan perangkat daerah kondisi triwulan II Tahun Anggaran 2022
	2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan tentang isu-isu penting penyelenggaraan

	2.4.	tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Review terhadap Awal RKPD Berisikan tentang review terhadap awal penyusunan RKPD
BAB III	Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	
	3.1.	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional Berisikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional yang berkaitan dengan ketahanan pangan
	3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Berisikan tentang tujuan dan sasaran Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2023
	3.3.	Program dan Kegiatan Berisikan tentang Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Tahun 2023
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Berisikan tentang Rencana Kerja dan sumber pendanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023	
BAB V	Penutup Berisikan tentang kondisi BKPSDM dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2023	

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Selama Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan prioritas guna menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan tersebut yakni :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- c. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

- a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
- b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- c. Pengembangan Kompetensi ASN
- d. Mutasi dan Promosi ASN

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

a. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sampai dengan akhir Tahun 2021 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan telah melaksanakan 6 Program 10 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan. Program dan semua sub kegiatan tersebut didukung dengan jumlah dana sebelum perubahan Rp.9.045.115.799 namun anggaran keseluruhan setelah perubahan sebesar Rp8.296.626.903,- dengan penyerapan anggaran sampai periode 31 Desember 2021 sebesar Rp.7.691.357.726,- atau mencapai 92,70%. Gambaran evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra BKPSDM sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

KODE						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Realisasi Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
										Target Renja Perangkat Daerah 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
5	03					Usuran : UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
5	03	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
5	03	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
5	03	01	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	100%
5	03	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
5	03	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	100%

							dan tamu												
5	03	01	2	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
5	03	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	200%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Ketersediaan alat tulis	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				
5	03	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dibeli	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%				

5	03	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%
5	03	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Alat Tulis Kantor								
5	03	01	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%
5	03	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	300%	12 bulan	24 bulan	100%
5	03	02				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
5	03	02	2	01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN									
5	03	02	2	01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Calon PPPK yang akan menjadi PPPK Jumlah formasi yang diusul Jumlah pelamar umum yang lulus pengadaan CPNS	654	650	-	-	-	-	650	99%
5	03	02	2	01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah PNS yang melakukan MPP Jumlah PNS yang pensiun APS Jumlah PNS yang pensiun BUP Jumlah PNS yang pensiun janda/ duda	345	343	-	-	-	-	343	99%

5	03	02	2	01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui (update) Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK	-	-	-	-	-	-	-	-
5	03	02	2	01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu								
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN	160 orang	50 orang	-	-	-	-	50 orang	31%
5	03	02	2	04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya								
5	03	02	2	04	07	Pembinaan Disiplin ASN	jumlah dilakukan sidang MPP Jumlah pasangan PNS yang mendapatkan pembekalan pra nikah PNS Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi								
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Fungsional Pol PP	15 orang	5 orang	-	-	-	-	5 orang	33%
5	03	02	2	03	02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan potensi Nilai Indeks Profesionalitas ASN								

5	03	02	2	03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan skripsi S1 Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S1 Jumlah PNS mendapatkan bantuan kerjasama Bappenas Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan tesis Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S.2 Jumlah rekomendasi ijin belajar yang disetujui Jumlah rekomendasi tugas belajar yang disetujui									
5	03	02	2	03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek Jumlah aturan yang disosialisasikan									
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN	Jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT)	400 orang	200 orang	-	-	-	-	200 orang	50%	
5	03	02	2	02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar									

a. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

1. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Keluaran :

Ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 35.223.220

Realisasi Keuangan : Rp. 35.087.300,- atau 99,61 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

2. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Keluaran :

Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 4.565.944.649,-

Realisasi Keuangan : Rp. 4.145.459.275,- atau 90,79 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

3. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Keluaran :

Ketersediaan layanan administrasi keuangan : 12 bulan.

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 99.600.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 83.200.000,- atau 83,53 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

4. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Keluaran :

Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 6.667.760,-

Realisasi Keuangan : Rp. 6.667.760,- atau 100,00 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

5. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Keluaran :

Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dibeli: 5 jenis

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 109.458.720,-

Realisasi Keuangan : Rp. 102.300.000,- atau 93,46 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

6. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Keluaran :

Ketersediaan alat tulis : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 35.460.250,-

Realisasi Keuangan : Rp. 35.208.570,- atau 99,29 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

7. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Keluaran :

Ketersediaan barang cetak dan penggandaan : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 37.120.600,-

Realisasi Keuangan : Rp. 30.860.000,- atau 83,14 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

8. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Keluaran :

Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan:
12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 5.400.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 5.400.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

9. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Keluaran :

Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 125.097.500,-

Realisasi Keuangan : Rp. 101.690.500,- atau 81,29 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

10. **Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan Tamu

Keluaran :

Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 8.550.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 8.236.500,- atau 96,33 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

11. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Keluaran :

Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 102.035.330,-

Realisasi Keuangan : Rp. 81.235.616,- atau 79,62 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

12. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Keluaran :

Ketersediaan jasa kebersihan kantor : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 36.967.660,-

Realisasi Keuangan : Rp. 36.812.560,- atau 99,58 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

13. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas operasional : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : 137.006.290,-

Realisasi Keuangan : 113.872.521- atau 83,11 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

14. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Keluaran :

Terpeliharanya peralatan kantor : 12 bulan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 16.350.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 16.350.000,- atau 100 %

Target Kinerja : 100 %

Realisasi Kinerja : 100 %

**15. Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota**

**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah**

**Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya**

Keluaran :

Terpeliharanya gedung kantor : 1 jenis

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 6.461.000,-

Realisasi Keuangan : Rp. 6.400.000,- atau 99,06 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

16. Program : Kepegawaian Daerah

**Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi
Kepegawaian ASN**

**Sub Kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian**

Keluaran :

Jumlah PNS yang melakukan MPP : 15 orang

Jumlah PNS yang pensiun APS : 10 orang

Jumlah PNS yang pensiun BUP : 300 orang

Jumlah PNS yang pensiun

Janda/duda : 20 orang"

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 28.875.300,-

Realisasi Keuangan : Rp. 28.862.400,- atau 99,96 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

17. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

Keluaran :

Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui (update): 6000 data

Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK : 0 aplikasi

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 90.588.900,-

Realisasi Keuangan : Rp. 88.968.686,- atau 98,21 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

18. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu : 225 berkas

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 18.068.320,-

Realisasi Keuangan : Rp. 16.017.320,- atau 88,65 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

19. **Program : Kepegawaian Daerah**

Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN

Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PP

Keluaran :

Jumlah Calon PPPK yang akan menjadi PPPK : 211 orang

Jumlah formasi yang diusul : 411 formasi

Jumlah pelamar umum yang lulus pengadaan CPNS : 32 orang

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 448.115.340,-

Realisasi Keuangan : Rp. 423.846.848,- atau 94,58 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

20. **Program : Kepegawaian Daerah**

Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN

Keluaran :

Jumlah pelantikan dan sumpah PNS : 5 kali

Jumlah PNS yang mutasi : 600 orang

Jumlah rekomendasi melepas : 20 rekomendasi

Jumlah rekomendasi menerima : 20 rekomendasi

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 106.645.730,-

Realisasi Keuangan : Rp. 105.516.579,- atau 98,94 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

21. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Keluaran :

Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar : 1400 berkas

Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah: 200 orang

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 125.061.234,-

Realisasi Keuangan : Rp. 125.033.034,- atau 99,98 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

22. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Promosi ASN

Keluaran :

Jumlah jabatan JPT Pratama yang akan diseleksi : 6 jabatan

Jumlah jabatan JPT Pratama yang akan diseleksi : 24 orang

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 366.324.420,-

Realisasi Keuangan : Rp. 337.763.206,- atau 92,20 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

23. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Keluaran :

Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek : 7 orang

Jumlah aturan yang disosialisasikan : 2 aturan

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 74.169.900,-

Realisasi Keuangan : Rp. 70.438.900,- atau 94,97 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

24. Program : Kepegawaian Daerah

Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Assessment Center

Keluaran :

Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan potensi : 0 orang

Nilai Indeks Profesionalitas ASN : 52.5 nilai

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 9.596.440,-

Realisasi Keuangan : Rp. 7.795.670,- atau 81,24 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

25. **Program : Kepegawaian Daerah**

Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN

Sub Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Keluaran :

Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan skripsi S1:
20 orang

Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S1:
20 orang

Jumlah PNS mendapatkan bantuan kerjasama Bappenas: 2 orang

Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan tesis : 2
orang

Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan bantuan wisuda
S.2: 5 orang"

Jumlah rekomendasi ijin belajar yang disetujui : 200 orang

Jumlah rekomendasi tugas belajar yang disetujui : 5 rekomendasi

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 35.063.830,-

Realisasi Keuangan : Rp. 26.831.043,- atau 76,52 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

26. **Program : Kepegawaian Daerah**

Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub

**Kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja
Aparatur**

Keluaran :

Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya : 2000 orang

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 16.518.750,-

Realisasi Keuangan : Rp. 15.517.250,- atau 93.94 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

27. Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota

Keluaran :

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. ,-

Realisasi Keuangan : Rp.,- atau -

Target Kinerja : -

Realisasi Kinerja : -

28. Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan : Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Keluaran :

Jumlah calon PNS yang mengikutipelatihan dasar : 142 orang

Jumlah PNS yang mengikuti PIM II : 2 orang

Jumlah PNS yang mengikuti PIM III : 0 orang

Hasil :

Jumlah Dana : Rp. 1.506.980.800,-

Realisasi Keuangan : Rp. 1.496.852.300,- atau 99,33 %

Target Kinerja : 100%

Realisasi Kinerja : 100 %

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Ctt	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Ketersediaan dokumen perencanaan dan keuangan	-	Jumlah PNS yang mendapatkan pelayanan kepegawaian	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2	Ketersediaan makan dan minum pegawai, rapat dan tamu	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
3	Terpeliharanya peralatan kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

4	Terpeliharanya gedung kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
5	Terpeliharanya kendaraan dinas operasional	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
6	Ketersediaan layanan administrasi keuangan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
7	Ketersediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
8	Ketersediaan alat tulis	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
9	Ketersediaan barang cetak dan penggandaan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

10	Pembayaran gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
11	Ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
12	Jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dibeli	-		20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	
13	Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Ketersediaan operasional untuk rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	-		7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	
14	Tersedianya Alat Tulis Kantor	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	

15	Ketersediaan jasa kebersihan kantor	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	3 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang	4 orang		
16	Ketersediaan air, listrik dan jasa komunikasi	-		12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
17	Jumlah Calon PPPK yang akan menjadi PPPK Jumlah formasi yang diusul Jumlah pelamar umum yang lulus pengadaan CPNS	-		150 orang	148 orang	654 orang	654 orang	654 orang	650 orang	674 orang	680 orang		
18	Jumlah PNS yang melakukan MPP Jumlah PNS yang pensiun APS Jumlah PNS yang pensiun BUP Jumlah PNS yang pensiun janda/ duda	-		60 orang	12 orang	-	345 orang	-	343 orang	350 orang	370 orang		

19	Jumlah data kepegawaian yang diperbaharui (update) Pengembangan aplikasi SIMPEG dan SAPK	-		2110 orang	1666 orang	210 orang	277 orang	242 orang	132 orang	2188 orang	4089 orang	
20	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan karpeg, karis/karsu	-		30 buku	-	-	-	-	-	-	-	
21	Jumlah peserta yang mengikuti diklat teknis manajemen ASN	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	129 orang	275 orang	400 orang	530 orang	482 orang	530 orang	640 orang	600 orang	
22	Jumlah pns yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya	-		190 orang	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang	190 orang

23	jumlah dilakukan sidang MPP Jumlah pasangan PNS yang mendapatkan pembekalan pra nikah PNS Jumlah PNS yang melanggar disiplin dan masalah perceraian yang diberikan rekomendasi	-		15 orang	20 orang	30 orang	35 orang	25 orang	30 orang	35 orang	40 orang	
24	Jumlah Peserta yang Mengikuti Diklat Fungsional Pol PP	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Jumlah ASN yang mengikuti pemetaan potensi Nilai Indeks Profesionalitas ASN	-		946 berkas	1050 berkas	-	-	-	-	-	-	
26	Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan skripsi S1 Jumlah PNS ijin belajar yang mendapatkan bantuan wisuda	-		208 berkas	225 berkas	119 berkas	305 berkas	236 berkas	305 berkas	305 berkas	345 berkas	

	S1 Jumlah PNS mendapatkan bantuan kerjasama Bappenas Jumlah PNS Tugas Belajar yang mendapatkan bantuan tesis Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan bantuan wisuda S.2 Jumlah rekomendasi ijin belajar yang disetujui Jumlah rekomendasi tugas belajar yang disetujui											
27	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi/bimtek Jumlah aturan yang disosialisasikan	-		7178 data	7150 data	5000 data	2000 data	5000 data	2000 data	2700 data	2700 data	
28	Jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT)	-		13 orang	8 orang	27 orang	28 orang	27 orang	28 orang	74 orang	100 orang	

29	Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar Jumlah PNS yang mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah	-		-	-	16 orang	19 orang	14 orang	1 orang	237 orang	5 kali	
30	Jumlah pelantikan dan sumpah PNS Jumlah PNS yang mutasi Jumlah rekomendasi melepas Jumlah rekomendasi menerima	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	-	41 orang	235 orang	-	30 orang	-	235 orang	6 jabatan	
31	Jumlah jabatan JPT Pratama yang akan diseleksi Jumlah peserta yang mengikuti seleksi JPT Pratama	-		13 orang	8 orang	27 orang	28 orang	27 orang	28 orang	74 orang	100 orang	
32	Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka Penyebarluasan Informasi Pembangunan	-	Persentase jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	-	41 orang	235 orang	-	30 orang	-	235 orang	6 jabatan	

33	Jumlah calon PNS yang mengikuti pelatihan dasar Jumlah PNS yang mengikuti PIM II Jumlah PNS yang mengikuti PIM II	-		803 Orang	450 Orang	-	420 orang	-	-	-	185 orang	
----	---	---	--	--------------	--------------	---	--------------	---	---	---	--------------	--

Pada kegiatan rutin di sekretariat, target Renstra pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021, realisasi capaian dan proyeksi tahun 2022 dan 2023 cenderung tetap dan tidak ada perubahan. Terdapat beberapa indikator kegiatan yang hanya dilakukan pada tahun 2018 atau 2019 saja antara lain jumlah peserta yang mengikuti diklat fungsional Pol PP, jumlah jumlah peserta yang mengikuti Achievement Motivation Training (AMT), dan jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi UU No.1 th 1974 ttg perkawinan, jumlah kartu KPE yang didistribusikan, tercapainya kegiatan penyusunan rencana karir PNS, DUK dan Bazetting, serta jumlah PNS yang mengikuti pembekalan ASN yang memasuki purnabakti

Untuk indikator yang wajib dilaksanakan seperti Jumlah berkas PNS yang diproses untuk usulan kenaikan pangkat dan pemakaian gelar, Jumlah PNS yang melakukan Mutasi Pindah dan Mutasi Jabatan Fungsional, Jumlah berkas PNS yang di proses untuk usulan Karpeg, Karis/Karsu dan Taspen, Jumlah sidang yang dilakukan oleh MPP, Jumlah sidang yang dilakukan oleh tim Baperjakat, dan lain-lain, target Renstra dan realisasi capaian dapat terpenuhi.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dari identifikasi permasalahan dan hambatan, tantangan dan peluang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menjadi perhatian dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur adalah:

1. Tidak semua SDM aparatur BKPSDM memiliki kemampuan IT
2. Fasilitas dan sarana prasarana pelayanan kepegawaian dan pengembangan SDM yang kurang memadai
3. Kurangnya pemahaman sebagian aparatur terhadap peraturan perundang-undangan kepegawaian
4. Masih adanya beberapa aparatur pemerintah yang penempatannya belum sesuai dengan disiplin ilmunya
5. Rendahnya kompetensi aparatur BKPSDM karena rendahnya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi pada pelaksanaan pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, dapat dikelompokkan beberapa faktor yang mempengaruhi baik dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal sebagai berikut :

1. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi :

- a. Jumlah petugas/aparatur tidak semua memiliki kemampuan IT.
- b. Sarana prasarana pelayanan administrasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang masih kurang memadai.
- c. Beberapa pegawai kurang memahami peraturan kepegawaian yang mengalami perubahan dan perkembangan secara cepat.
- d. Etos kerja aparatur yang rendah

2. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi :

- a. Tingkat pemahaman/pendidikan pemakai jasa layanan terhadap peraturan kepegawaian
- b. Belum terdatanya sumber daya manusia aparatur yang tepat untuk mengisi jabatan struktural yang kosong di beberapa Perangkat Daerah oleh Baperjakat Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Kurangnya sumber daya manusia aparatur di beberapa perangkat daerah sehingga penempatan PNS belum sesuai antara disiplin ilmu dan tupoksi yang dikerjakan sehari-hari.
- d. Rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur.

2.4 Review terhadap Awal RKPD

awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholders dan pemerintah sendiri. awal menginformasikan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan Renja Perangkat Daerah. awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun direncanakan dan tahun yang akan datang. Berdasarkan awal BKPSDM serta berdasarkan hasil analisis kebutuhan diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2021 sesuai dengan dengan evaluasi renja.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikator		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. IV Jurai	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	1 Dokumen	10.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. IV Jurai	Jumlah dokumen perencanaan OPD yang disusun	1 Dokumen	10.000.000		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000		
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.050.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	6.050.000		

4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	9.500.000	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.344.460	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	13.344.460	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. IV Jurai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bu	4.264.547.362	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. IV Jurai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46 Orang/bu	4.264.547.362	
7	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	85.510.903	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20 Dokumen	85.510.903	

8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.575.620	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	6.575.620	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
9	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	750.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	750.000	
10	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.825.620	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	5.825.620	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 Dokumen	1.000.000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	47 Dokumen	1.000.000	

12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	47 Dokumen	4.000.000	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	47 Dokumen	4.000.000	
13	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. IV Jurai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15.000.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec. IV Jurai	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	15.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.220	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	5.500.220	
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	22.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	179.500.000	

16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3.000.000	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.713.006	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	36.713.006	
18	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.500.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. IV Jurai	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	31.500.000	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 Dokumen	5.400.000	
20	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.550.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	8.550.000	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	150.000.000	

22	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	5.000.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen	5.000.000	
23	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	25.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kec. IV Jurai	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	25.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	89.265.363	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	133.689.097	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	48.712.807	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. IV Jurai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	52.712.807	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					

26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. IV Jurai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	50.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. IV Jurai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	54.900.000	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	40.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.400.000	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19.764.964	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	19.764.964	
29	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. IV Jurai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14.500.000	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Kec. IV Jurai	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	14.500.000	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. IV Jurai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.292.737	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. IV Jurai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	78.295.000	
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					
Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN						Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian ASN					

31	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200 Dokumen	100.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	200 Dokumen	219.676.920	
32	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	314 Dokumen	16.016.270	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	314 Dokumen	55.518.670	
33	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6000 Dokumen	55.932.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	6000 Dokumen	69.804.400	

34	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	250 Dokumen	17.790.400	Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	250 Dokumen	17.790.400	
Mutasi dan Promosi ASN						Mutasi dan Promosi ASN					
35	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	60.000.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	200 Dokumen	152.145.920	
36	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350 Dokumen	90.000.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350 Dokumen	162.904.090	

37	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	450 Dokumen	5.000.000	Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	450 Dokumen	309.979.580	
Pengembangan Kompetensi ASN						Pengembangan Kompetensi ASN					
38	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	19.639.950	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	20 Orang	33.747.650	
39	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	20.000.000	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	2 Orang	140.288.810	
40	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	5.000.000	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	2 Dokumen	81.714.560	
41	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	0 Orang 50 Orang	20.750.000	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	0 Orang 50 Orang	20.750.000	

Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					
42	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6000 Dokum	62.265.400	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6000 Dokum	455.935.660	
43	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 Orang 100 Orang	20.212.500	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	0 Orang 100 Orang	37.859.420	
44	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 Orang 20 Orang	79.137.780	Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	0 Orang 20 Orang	41.964.970	
45	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	15.000.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2 Laporan	210.000.000	

46	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	15.000.000	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen	50.183.060	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS					
47	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	IV Jurai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	40 Laporan	100.000.000	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	IV Jurai	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	40 Laporan	2.356.385.670	

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Pesisir Selatan menjalankan 3 program kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program kepegawaian daerah, dan program pengembangan sumber daya manusia. Pada dasarnya, program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan satu sama lain, di mulai dari kegiatan penyusunan formasi PNS & PPPK, seleksi CPNS & PPPK, Pelatihan Dasar bagi CPNS, sampai dengan kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian yang diantaranya terdapat kegiatan-kegiatan wajib lain yang pasti dilalui oleh PNS seperti kenaikan pangkat, mutasi dan pomosi PNS, pendidikan lanjutan, serta pengelolaan data kepegawaian. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian se Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan aplikasi SIMPEG dan dalam pelayanan kepegawaian menggunakan aplikasi terpusat yaitu SAPK.

Selain pengembangan kompetensi ASN dalam upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia Kabupaten Pesisir Selatan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia juga melakukan evaluasi terhadap PNS dan melaksanakan fungsi pembinaan PNS dengan memberikan reward & punishment yaitu pemberian tanda jasa bagi PNS yang memenuhi syarat dan penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang melanggar aturan.

Mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berkinerja tinggi adalah tujuan dari BKPSDM kabupaten Pesisir Selatan dengan indikatornya adalah nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN. Saat ini, nilai IP ASN BKPSDM kabupaten Pesisir Selatan dinilai sangat rendah yaitu 51.92 (keadaan 25 Agustus 2021) disebabkan oleh minimnya pendidikan dan pelatihan yang dapat di ikuti oleh PNS. Untuk memperbaiki nilai tersebut, BKPSDM merencanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS

yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan Nasional Tk.II dan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang bekerja dalam bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan pilihan yaitu bidang pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan usulan yang dihasilkan pada pelaksanaan Musrenbang dan reses Anggota DPRD dibahas dan dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa OPD sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan berdasarkan bidang koordinasi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak mendapatkan usulan program/kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat

Tabel 2.4

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2023
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia, yang tidak memiliki usulan yang lahir melalui musrenbang.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.1.1 Telaahan dari Badan Kepegawaian Negara

Dalam rangka mengemban amanah mandat Undang-Undang, visi Badan Kepegawaian Negara Tahun 2021-2025 adalah melaksanakan visi Presiden Nomor 8 (delapan) yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dengan melaksanakan arahan Presiden Nomor 4 (empat) yaitu penyederhanaan birokrasi dan agenda pembangunan Nomor 7 (tujuh) yaitu memperkuat stabilitas polkumham dan transformasi pelayanan publik dengan ***“mewujudkan pengelola ASN yang profesional dan berintegritas untuk mendukung tercapainya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”***

3.1.2 Telaahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2021-2025 yaitu:

“Mewujudkan aparatur negara yang profesional dan berintegritas tinggi untuk mencapai pemerintahan yang berkelas dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong”

Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Visi BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Renja BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Pesisir Selatan

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA					
				TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya manajemen ASN yang Profesional dan Berkinerja Tinggi		Indeks Profesionalitas ASN	56	57	57	58	58	58
		Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian	Tingkat kepuasan pelayanan Administrasi Kepegawaian	75%	80%	85%	90%	90%	90%
			Inovasi BKPSDM	1	1	1	1	1	1

2.		Meningkatnya manajemen sistem karir ASN berdasarkan merit system	% jabatan yang terisi sesuai dengan kompetensi	25%	35%	50%	65%	85%	95%
3.		Meningkatnya akuntabilitas kinerja BKPSDM	Hasil Penilaian AKIP oleh Inspektorat	A	A	A	A	A	A

Agar program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tepat sesuai yang diharapkan, maka ditetapkan tujuan dan sasarnya terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran program/ kegiatan Tahun 2023 dapat kita uraikan berikut ini :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan :

Melaksanakan peningkatan pelayanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

Sasaran:

Tersedianya pelayanan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, penyedia jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

2. Program Kepegawaian Daerah

Tujuan:

Melaksanakan peningkatan pelayanan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi

ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

Sasaran:

Tersedianya pelayanan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN, mutasi dan promosi ASN, pengembangan kompetensi ASN, penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Tujuan:

Melaksanakan peningkatan pelayanan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

Sasaran:

Tersedianya peningkatan pelayanan kegiatan sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada tahun 2023 pada dasarnya merupakan program dan kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Selain program dan kegiatan rutin, BKPSDM merencanakan Program dan kegiatan pengelolaan kepegawaian dan program untuk pengembangan kompetensi Aparatur yang tertuang dalam Rencana Aksi Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia.

Didalam tahapan penyusunan program dan kegiatan ini, mungkin terjadi ketidaksesuaian dengan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya maka akan dilakukan perbaikan terhadap program dan kegiatan yang tersaji dalam RKPD Tahun 2022.

Adapun program dan kegiatan yang dirancang Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Perkiraan Maju Bersama Tahun 2024					
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif				
1	2	3	4	5	6	7	8	5	6				
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				5.764.547.362				
5	03				KEPEGAWAIAN				5.664.547.362				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.062.803.062				
5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				46.394.460				
5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	10.000.000	APBD		1 Dokumen	10.000.000
5	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	7.500.000	APBD		1 Dokumen	7.500.000

5	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	6.050.000	APBD		1 Dokumen	6.050.000
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	4 Laporan	9.500.000	APBD		4 Laporan	9.500.000
5	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	4 Laporan	13.344.460	APBD		4 Laporan	13.344.460
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.356.633.885				4.356.633.885
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	46 Orang/bu	4.264.547.362	APBD		46 Orang/bu	4.264.547.362
5	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	20 Dokumen	85.510.903	APBD		20 Dokumen	85.510.903

5	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	6.575.620	APBD		12 Laporan	6.575.620
5	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.575.620				6.575.620
5	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	750.000	APBD		1 Dokumen	750.000
5	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	5.825.620	APBD		12 Laporan	5.825.620
5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000				20.000.000
5	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	47 Dokumen	1.000.000	APBD		47 Dokumen	1.000.000

5	03	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	47 Dokumen	4.000.000	APBD		47 Dokumen	4.000.000
5	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	50 Orang	15.000.000	APBD		50 Orang	15.000.000
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				292.663.226				292.663.226
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	5.500.220	APBD		12 Paket	5.500.220
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Paket	22.000.000	APBD		2 Paket	22.000.000
5	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	3 Paket	3.000.000	APBD		3 Paket	3.000.000

5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	36.713.006	APBD		12 Paket	36.713.006
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	31.500.000	APBD		12 Paket	31.500.000
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	36 Dokumen	5.400.000	APBD		36 Dokumen	5.400.000
5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	8.550.000	APBD		12 Laporan	8.550.000

5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	150.000.000	APBD		12 Laporan	150.000.000	
5	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	50 Dokumen	5.000.000	APBD		50 Dokumen	5.000.000	
5	03	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Dokumen	25.000.000	APBD		12 Dokumen	25.000.000	
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					137.978.170				137.978.170
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	89.265.363	APBD		12 Laporan	89.265.363	

5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	48.712.807	APBD		12 Laporan	48.712.807
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.557.701				202.557.701
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Unit	50.000.000	APBD		2 Unit	50.000.000
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	7 Unit	40.000.000	APBD		7 Unit	40.000.000
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	40 Unit	19.764.964	APBD		40 Unit	19.764.964
5	03	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Unit	14.500.000	APBD		1 Unit	14.500.000
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Unit	78.292.737	APBD		1 Unit	78.292.737
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				601.744.300				601.744.300

5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				189.738.670				189.738.670
5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Dokumen	100.000.000	APBD		200 Dokumen	100.000.000
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314 Dokumen	16.016.270	APBD		314 Dokumen	16.016.270
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Dokumen	55.932.000	APBD		6000 Dokumen	55.932.000
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Dokumen	17.790.400	APBD		250 Dokumen	17.790.400
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN				155.000.000				155.000.000

5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	200 Dokumen	60.000.000	APBD		200 Dokumen	60.000.000
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	350 Dokumen	90.000.000	APBD		350 Dokumen	90.000.000
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	450 Dokumen	5.000.000	APBD		450 Dokumen	5.000.000
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN				65.389.950				65.389.950
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	20 Orang	19.639.950	APBD		20 Orang	19.639.950

5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Orang	20.000.000	APBD		2 Orang	20.000.000
5	03	02	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Dokumen	5.000.000	APBD		2 Dokumen	5.000.000
5	03	02	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Orang 50 Orang	20.750.000	APBD		0 Orang 50 Orang	20.750.000
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				191.615.680				191.615.680
5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	6000 Dokum	62.265.400	APBD		6000 Dokum	62.265.400

5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Orang 100 Orang	20.212.500	APBD		0 Orang 100 Orang	20.212.500
5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang 20 Orang	79.137.780	APBD		0 Orang 20 Orang	79.137.780
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Laporan	15.000.000	APBD		2 Laporan	15.000.000
5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	15.000.000	APBD		12 Dokumen	15.000.000
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				100.000.000				100.000.000
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				100.000.000				100.000.000
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100.000.000				100.000.000

5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	40 Laporan	100.000.000	APBD		40 Laporan	100.000.000
TOTAL									5.764.547.362				5.764.547.362

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir Tahun Anggaran pelaksanaannya dapat diukur.

rencana kerja Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 4.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana				
1	2	3	4	5	6	7	8			
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.764.547.362				
5	03				KEPEGAWAIAN	5.664.547.362				
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.062.803.062				
5	03	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.394.460				
5	03	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	10.000.000	APBD
5	03	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	7.500.000	APBD

5	03	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	6.050.000	APBD		
5	03	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	4 Laporan	9.500.000	APBD		
5	03	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	4 Laporan	13.344.460	APBD		
5	03	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.356.633.885			
5	03	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	46 Orang/bu	4.264.547.362	APBD		
5	03	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	20 Dokumen	85.510.903	APBD		

5	03	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	6.575.620	APBD	
5	03	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				6.575.620		
5	03	01	2,03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Dokumen	750.000	APBD	
5	03	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	5.825.620	APBD	
5	03	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				20.000.000		
5	03	01	2,05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	47 Dokumen	1.000.000	APBD	

5	03	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	47 Dokumen	4.000.000	APBD	
5	03	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	50 Orang	15.000.000	APBD	
5	03	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				292.663.226		
5	03	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	5.500.220	APBD	
5	03	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Paket	22.000.000	APBD	
5	03	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	3 Paket	3.000.000	APBD	

5	03	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	36.713.006	APBD	
5	03	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Paket	31.500.000	APBD	
5	03	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	36 Dokumen	5.400.000	APBD	
5	03	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	8.550.000	APBD	

5	03	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	150.000.000	APBD		
5	03	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	50 Dokumen	5.000.000	APBD		
5	03	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Dokumen	25.000.000	APBD		
5	03	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				137.978.170			
5	03	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	89.265.363	APBD		

5	03	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	12 Laporan	48.712.807	APBD	
5	03	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				202.557.701		
5	03	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Unit	50.000.000	APBD	
5	03	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	7 Unit	40.000.000	APBD	
5	03	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	40 Unit	19.764.964	APBD	
5	03	01	2,09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Unit	14.500.000	APBD	
5	03	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	1 Unit	78.292.737	APBD	
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH				601.744.300		
5	03	02	2,01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				189.738.670		

5	03	02	2,01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	200 Dokumen	100.000.000	APBD	
5	03	02	2,01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	314 Dokumen	16.016.270	APBD	
5	03	02	2,01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	6000 Dokumen	55.932.000	APBD	
5	03	02	2,01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	250 Dokumen	17.790.400	APBD	
5	03	02	2,02		Mutasi dan Promosi ASN				155.000.000		

5	03	02	2,02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	200 Dokumen	60.000.000	APBD		
5	03	02	2,02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	350 Dokumen	90.000.000	APBD		
5	03	02	2,02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	450 Dokumen	5.000.000	APBD		
5	03	02	2,03		Pengembangan Kompetensi ASN				65.389.950			
5	03	02	2,03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	20 Orang	19.639.950	APBD		

5	03	02	2,03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Orang	20.000.000	APBD	
5	03	02	2,03	12	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Dokumen	5.000.000	APBD	
5	03	02	2,03	13	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Orang 50 Orang	20.750.000	APBD	
5	03	02	2,04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				191.615.680		
5	03	02	2,04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	6000 Dokum	62.265.400	APBD	

5	03	02	2,04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	0 Orang 100 Orang	20.212.500	APBD	
5	03	02	2,04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0 Orang 20 Orang	79.137.780	APBD	
5	03	02	2,04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	2 Laporan	15.000.000	APBD	
5	03	02	2,04	09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12 Dokumen	15.000.000	APBD	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				100.000.000		
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				100.000.000		
5	04	02	2,02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				100.000.000		

5	04	02	2,02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	40 Laporan	100.000.000	APBD	
TOTAL									5.764.547.362		

Disamping kegiatan rutin yang harus dilaksanakan, untuk mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berkinerja tinggi yang merupakan tujuan dari BKPSDM kabupaten Pesisir Selatan dengan indikatornya adalah nilai Indeks Profesionalitas (IP) ASN, BKPSDM merencanakan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yaitu pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan Nasional Tk.II dan pendidikan dan pelatihan bagi PNS yang bekerja dalam bidang urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, dan urusan pilihan yaitu bidang pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, serta bidang lainnya.

Dengan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, diharapkan kompetensi ASN lebih berkembang, bernilai saing, dan mampu membangun bidang pekerjaannya menjadi lebih baik dengan pola berfikir yang maju, sehingga tujuan BKPSDM untuk mewujudkan manajemen ASN yang profesional dan berkinerja tinggi dapat terwujud.


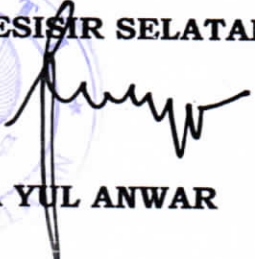
BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian terdahulu dapat disimpulkan bahwa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang sedang disusun sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, kebutuhan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan isu-isu strategis yang berkembang saat ini.

Rencana kerja (RENJA) Tahun 2023 yang disusun oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, merupakan rencana tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Rencana Kerja ini memberikan gambaran mengenai program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja dan target yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dan pada akhir tahun anggaran pelaksanaannya dapat diukur. Diharapkan Program Kerja yang telah direncanakan dapat direalisasikan sesuai target dan penganggaran serta sesuai dengan jadwal kegiatan.

Demikianlah rancangan rencana kerja Tahun 2023 ini disampaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.


BUPATI PESISIR SELATAN

RUSMA YUL ANWAR



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 57);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 72), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten

- Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 235);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 79);
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang Selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMD daerah dan mengacu pada RKP Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Renstra BKPSDM adalah dokumen perencanaan dinas untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja BKPSDM adalah dokumen perencanaan dinas Tahun 2023.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut RKA BKPSDM adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan dinas serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Renja BKPSDM disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan acuan dalam penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup dinas dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Pasal 3

Renja BKPSDM disusun bertujuan untuk :

- a. pedoman penyusunan RKA BKPSDM Tahun 2023; dan
- b. pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BKPSDM Tahun 2023.

Pasal 4

- (1) Renja BKPSDM berpedoman pada Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 dan RKPD Tahun 2023.
- (2) Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan evaluasi hasil Renja BKPSDM tahun lalu dan evaluasi hasil Renja BKPSDM tahun berjalan.
- (3) Memperhatikan evaluasi hasil Renja BKPSDM tahun lalu dan evaluasi hasil Renja BKPSDM tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja BKPSDM dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra BKPSDM.
- (4) Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Kepala BKPSDM menjaga kesesuaian antara Renja BKPSDM dengan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023.

Pasal 6

(1) Renja BKPSDM disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Tahun 2022;
- c. BAB III Tujuan dan Sasaran;
- d. BAB IV Rencana kerja dan Pendanaan; dan
- e. BAB V Penutup.

(2) Penjabaran Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Kepala BKPSDM melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Renja BKPSDM.

(2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Renja BKPSDM;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap Renja BKPSDM; dan
- c. evaluasi terhadap hasil Renja BKPSDM.

(3) Kepala BKPSDM menyusun laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja BKPSDM secara berkala setiap triwulan untuk dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapedalitbang.

(4) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dan hasil Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis usulan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pasal 8

(1) Perubahan Renja BKPSDM dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

(2) Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah BKPSDM menerima surat edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

(3) Penyusunan Perubahan Renja BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :

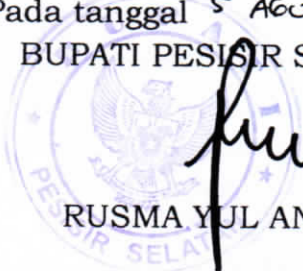
- c. Perubahan RKPD Tahun 2023; dan
- d. hasil pengendalian pelaksanaan Renja BKPSDM sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
BUPATI PESISIR SELATAN,



[Handwritten Signature]
RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 5 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



[Handwritten Signature]
MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 41



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 570 / 371 /Kpts/BPT-PS/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk tim penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

- Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 7);
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengumpulkan data dan informasi dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022, Rencana Kerja Tahun 2023 dan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal, 22 Juli 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,


RUSMA YUL ANWAR



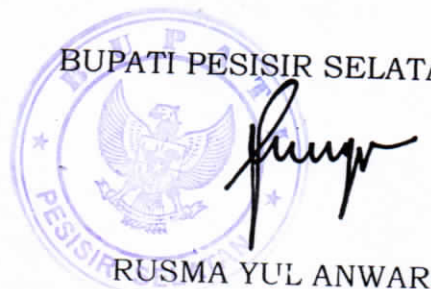
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR: 570 / 371 / Kpts / BPT-PS / 2022
TANGGAL 22 Juli 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA TAHUN 2023 DINAS/BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2023 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TAMSIR, S.H., M.M	Kepala BKPSDM	Ketua Tim
2.	HENDRAWATI, S.E	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris Tim
3.	SYAFRINO, S.A.P, M.I.Kom	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi ASN	Anggota
4.	AFRIKAL, S.H	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja ASN	Anggota
5.	AFRIANTO, S.E, M.M	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Anggota
6.	FERA NOFITA SARI, S.I.P	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
7.	RANTI ARIYANI, S.S.T., M.Si	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan	Anggota
8.	DEWI LISTYAWATI, S.Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
9.	MUHAIMIN ZURNA, S.E, M.CIO	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
10.	EFLIZAR M, S.H	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
11.	SEPTRIA NEVITA, S.E, M.I. Kom	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
12.	ROSMANIAR, S.H	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
13.	RIZKI HANAFAI, S.STP	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
14.	MUHAMAD KADRI, S.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota
15.	YULWIDYA ISFA PUTRA, S.E., M.Si	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR